

**PENGARUH PENDIDIKAN, KESEHATAN, UPAH MINIMUM  
DAN PDRB PER KAPITA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK  
MISKIN DI PROVINSI JAWA TIMUR**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk  
memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:  
Vishy Nurazmi Ramadhan  
6021901022**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN  
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan LAMEMBA No. 791/DE/A.5/AR.10/X/2023  
BANDUNG  
2024**

**THE EFFECT OF EDUCATION, HEALTH, MINIMUM WAGE  
AND GRDP PER CAPITA ON THE NUMBER OF POOR PEOPLE  
IN EAST JAVA PROVINCE**



**UNDERGRADUATE THESIS**

**Submitted to complete part of the requirements for  
Bachelor Degree in Economics**

**By  
Vishy Nurazmi Ramadhan  
6021901022**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY  
FACULTY OF ECONOMICS  
PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS  
Accredited by LAMEMBA No. 791/DE/A.5/AR.10/X/2023  
BANDUNG  
2024**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN**



**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH PENDIDIKAN, KESEHATAN, UPAH MINIMUM  
DAN PDRB PER KAPITA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK  
MISKIN DI PROVINSI JAWA TIMUR**

**Oleh:  
Vishy Nurazmi Ramadhan  
6021901022**

Bandung, Agustus 2024

Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan,

*Ivanti Mokoginta* - 2024.08.02  
13:39:35 +07'00'

Ivantia Savitri Mokoginta, MBA., M.A., Ph.D.

Pembimbing,

Yanuarita Hendrani, Dra., M.a., Ph.D.

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Vishy Nurazmi Ramadhan  
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 30 November 2001  
NPM : 6021901022  
Program Studi : Sarjana Ekonomi Pembangunan  
Jenis naskah : Skripsi

## JUDUL

**Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Upah Minimum dan PDRB per Kapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur**

Pembimbing : Yanuarita Hendrani, Dra., M.A., Ph.D.

## MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri:

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat merupakan peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya.  
Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung, 3 Juli 2024



(Vishy Nurazmi Ramadhan)

## ABSTRAK

Provinsi Jawa Timur memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap ekonomi di Pulau Jawa sebesar 24,9% dan 14,29% terhadap perekonomian nasional Indonesia. Meskipun menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap roda perekonomian, namun Provinsi Jawa Timur memiliki masalah cukup serius terkait kemiskinan. Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia yaitu sebesar 4.188 juta jiwa pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan, kesehatan, upah minimum dan PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data panel dengan variabel rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, upah minimum dan PDRB per kapita di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur dengan rentang tahun 2013-2023. Metode yang digunakan adalah Panel Least Square (PLS). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa rata-rata lama sekolah dan PDRB per kapita berpengaruh secara negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Upah minimum berpengaruh secara positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Angka harapan hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

**Kata kunci:** Kemiskinan, Jawa Timur, Rata-rata lama sekolah, Angka Harapan Hidup, Upah Minimum, PDRB per Kapita.

## ABSTRACT

*East Java Province has the second largest contribution to economic growth on the island of Java at 24.9% and 14.29% to Indonesia national economy. Despite being one of the largest contributors to the economy, the East Java Province has a serious problem with poverty. East Java is the province with the largest number of poor people in Indonesia, which amounted to 4.188 million people in 2023. This study aims to analyze the effect of education, health, minimum wage and GRDP per capita on the number of poor people in East Java Province. This research uses panel data with the variables average length of schooling, life expectancy, minimum wage and GRDP per capita in 38 districts/cities of East Java Province with a range of years 2013-2023. The method used is Panel Least Square (PLS). The results obtained from this study are that the average length of schooling and GRDP per capita have a significant negative effect on the number of poor people. Minimum wage has a significant positive effect on the number of poor people. Life expectancy has no significant effect on the number of poor people.*

**Keywords:** *Poverty, East Jawa, Average Years of Schooling, Life Expectancy, Minimum Wage, GRDP per Capita.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Upah Minimum dan PDRB Per Kapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur”. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala bantuan, dukungan, doa dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Ibu Novita Anisfo Mutabungan dan Bapak Adhy Margana Rahmatullah** selaku orang tua penulis. Terima kasih atas segala dukungan, doa dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih telah memberikan pembelajaran hidup yang begitu berarti dan kasih sayang yang begitu besar kepada penulis. Terima kasih selalu mengingatkan untuk terus dekat dengan Allah SWT.
2. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan doanya kepada penulis.
3. **Ibu Yanuarita Hendrani, Dra., M.A., Ph.D.** selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih karena telah membimbing dan memberikan arahan serta saran selama proses penyusunan skripsi ini dengan penuh rasa sabar.
4. **Ibu Deba Luthfia, S.E., M.B.A.** selaku dosen wali penulis. Terima kasih atas segala bantuan, saran dan masukan yang telah diberikan selama berkuliah di UNPAR dengan penuh rasa sabar.
5. Teman-teman dan rekan seperjuangan. Terima kasih selalu memberikan motivasi melalui berbagai pertanyaan “kapan lulus”, “udah selesai skripsi”, “kapan wisuda” sehingga penulis menjadi semangat dalam penyusunan skripsi.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis bersedia menerima kritik dan saran atas penulisan skripsi. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi motivasi untuk penelitian selanjutnya.

Bandung, 3 Juli 2024

Vishy Nurazmi Ramadhan

# DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan .....	6
1.4 Kerangka Pemikiran .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1 Kemiskinan.....	9
2.2 Teori Vicious Circle of Poverty.....	10
2.3 Upah Minimum .....	11
2.4 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita .....	14
2.5 Penelitian Terdahulu .....	15
BAB III METODE DAN OBJEK PENELITIAN .....	18
3.1 Metode Penelitian.....	18
3.2 Estimasi Model Regresi Data Panel .....	18
3.3 Uji Assumsi Klasik .....	20
3.3.1 Uji Heterokedastisitas .....	20
3.3.2 Uji Multikolinearitas .....	20
3.4 Data dan Sumber Data.....	20
3.5 Objek Penelitian .....	21
3.5.1 Jumlah Penduduk Miskin .....	21
3.5.2 Rata-rata Lama Sekolah .....	21
3.5.3 Angka Harapan Hidup .....	22
3.5.4 Upah Minimum.....	22
3.5.5 PDRB Per Kapita .....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	29
4.1 Hasil Penelitian .....	29
4.2 Pemilihan Model.....	29
4.2.1 Uji Chow .....	29
4.2.2 Uji Hausman .....	30
4.3 Model Terpilih.....	30
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	31
4.4.1 Uji Heterokedastisitas .....	31

4.4.2 Uji Multikolinearitas .....	32
4.5 Pembahasan .....	33
4.5.1 Pengaruh Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin .....	33
4.5.2 Pengaruh Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin .....	35
4.5.3 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin .....	37
4.5.4 Pengaruh PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin.....	39
BAB V PENUTUP.....	41
5.1 Kesimpulan .....	41
5.2 Implikasi Kebijakan dan Saran .....	42
DAFTAR PUSTAKA .....	44
Lampiran 1: Pemilihan Model.....	A-1
Lampiran 2: Pengujian Pemilihan Model.....	A-4
Lampiran 3: Uji Asumsi Klasik.....	A-5

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penelitian .....	20
Tabel 2. Uji Chow.....	29
Tabel 3. Uji Hausman .....	30
Tabel 4. Fixed Effect Model .....	30
Tabel 5. Uji Heterokedastisitas.....	32
Tabel 6. Uji Multikolinearitas .....	32
Tabel 7. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah dengan Jumlah Penduduk Miskin .....	34
Tabel 8. Perbandingan Rata-rata Angka Harapan Hidup dengan Jumlah Penduduk Miskin .....	36
Tabel 9. Perbandingan Rata-rata Upah Minimum dengan Jumlah Penduduk Miskin .....	38
Tabel 10. Perbandingan Rata-rata PDRB per Kapita dengan Jumlah Penduduk Miskin .....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Asia Tenggara 2023 .....	2
Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 2015-2023 .....	3
Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi.....	4
Gambar 4. Kerangka Pemikiran .....	7
Gambar 5. Lingkaran kemiskinan .....	11
Gambar 6. Kurva Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja.....	12
Gambar 7. Rata-Rata Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Jawa Timur 2013-2023 .....	24
Gambar 8. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Jawa Timur 2013-2023.....	25
Gambar 9. Rata-rata Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Jawa Timur 2013-2023 .....	26
Gambar 10. Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Timur 2013-2023 .....	27
Gambar 11. Rata-rata PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Jawa Timur 2013-2023.....	28

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

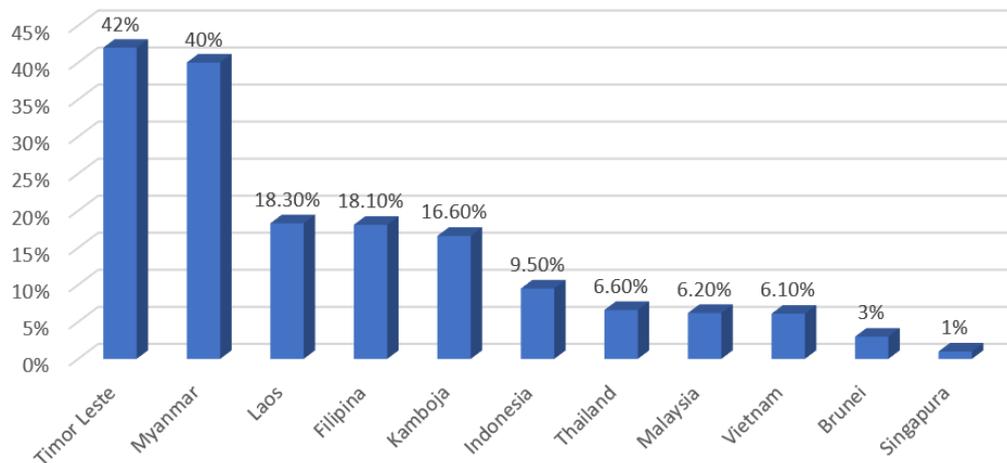
Pembangunan yang bersifat berkelanjutan tidak sekedar merujuk pada peningkatan pertumbuhan ekonomi saja, melainkan merujuk pada peningkatan kualitas standar hidup manusia secara menyeluruh. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selamanya mencerminkan pembangunan ekonomi yang baik. Pembangunan ekonomi sendiri merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu mengalami kenaikan. Kesejahteraan bagi setiap warga negara merupakan salah satu tujuan yang mendasar dari pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam hal ini, mengacu pada setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya secara maksimal (Masruroh & Zuber, 2014).

Kesejahteraan dapat tercapai apabila setiap individu mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidup dasarnya, namun pada kenyataannya pembangunan ekonomi sering kali dihadapkan oleh berbagai masalah salah satunya yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi dimana adanya keterbatasan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya dari sisi ekonomi diukur berdasarkan sisi pengeluaran. Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dan cukup kompleks yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia termasuk Indonesia karena bersifat multidimensi. Masalah kemiskinan tidak hanya terbatas pada kemampuan finansial yang dimiliki oleh setiap individu, melainkan dapat memengaruhi faktor lain seperti masalah sosial, ekonomi dan politik (Badan Pusat Statistik, 2023).

Berdasarkan Department of Economic and Social Affairs (2023), dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) isu kemiskinan menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan yang harus di selesaikan yaitu *No Poverty* (akhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun). Terdapat 7 target dalam tujuan *No Poverty* diantaranya; (1) Mengakhiri kemiskinan ekstrim, (2) Menurunkan kemiskinan paling sedikit 50% dari total keseluruhan, (3) Pelaksanaan sistem perlindungan sosial, (4) Hak yang sama atas kepemilikan, teknologi, layanan dasar dan sumber daya ekonomi, (5) Membangun ketahanan terhadap bencana lingkungan, ekonomi dan sosial, (1a) Menggerakkan sumber daya untuk mewujudkan kebijakan dalam mengakhiri kemiskinan, (1b) Menciptakan kerangka kerja kebijakan yang berpihak pada kaum miskin dan sensitif gender. Secara keseluruhan, *Sustainable Development Goals* sendiri memiliki 17 tujuan dan 169 target yang bertujuan untuk mengatasi berbagai

permasalahan pembangunan, sosial dan ekonomi. Di Indonesia sendiri, masalah kemiskinan masih menjadi kenyataan yang sulit untuk dihindari dan terus menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalam menetapkan sebuah kebijakan (Putri & Prasetyanto, 2021).

**Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Asia Tenggara 2023**



**Sumber:** GoodStats (Diolah)

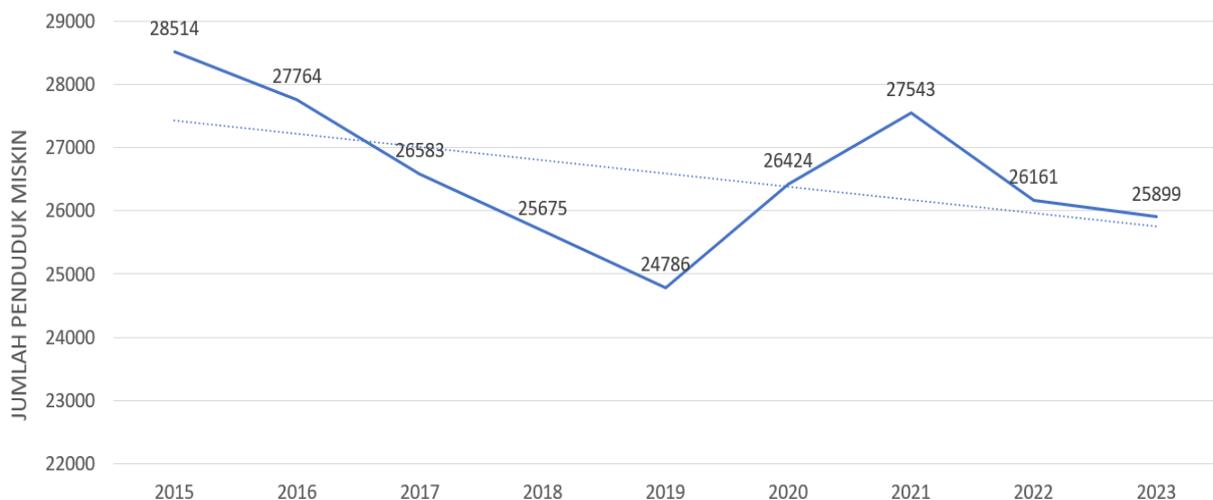
Berdasarkan laporan GoodStats (2023), persentase tingkat kemiskinan di bawah garis kemiskinan Indonesia menempati posisi ke-6 dari 11 negara ASEAN pada tahun 2023 yaitu dengan 9,5%. Persentase tersebut masih terbilang cukup tinggi bagi negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk sangat banyak. Berdasarkan world data (2023), Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 280,7 juta jiwa pada tahun 2023 yang menjadikannya menempati peringkat ke-4 sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dengan kata lain, kurang lebih ada sebanyak 26 juta penduduk Indonesia hidup berada di bawah garis kemiskinan (Aditiya, 2023).

Garis kemiskinan adalah ambang batas pendapatan terendah yang diperlukan suatu negara untuk mencapai standar hidup yang cukup dengan diukur melalui indikator makanan dan non-makanan (Badan Pusat Statistik, 2023). Penentuan garis kemiskinan sendiri cukup memiliki perbedaan yang signifikan baik yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik maupun oleh World Bank sehingga memunculkan berbagai perdebatan mengenai ambang batas tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik adalah pendekatan kebutuhan dasar sedangkan World Bank menggunakan pendekatan *Purchasing Power Parity* (PPP). Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik menetapkan garis kemiskinan Indonesia sebesar Rp 505.469 per kapita per bulan dengan pembagian masing-masing sebesar Rp 374.455 untuk garis kemiskinan makanan dan Rp 131.014 untuk garis kemiskinan non-makanan. Sedangkan, World Bank

menetapkan garis kemiskinan ekstrem sebesar \$2,15 per kapita per hari. Dengan demikian, hampir dua kali lipat adanya perbedaan dari kedua ambang batas tersebut dan jika merujuk pada World Bank sebenarnya jumlah penduduk miskin Indonesia lebih banyak dari yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Sehingga, perlu dilakukannya evaluasi kembali agar hasilnya menjadi tepat dan sesuai (Dewan Perwakilan Rakyat, 2022).

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melakukan berbagai cara dalam menurunkan angka kemiskinan. Agar pengentasan masalah kemiskinan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka dibutuhkan suatu komitmen dan kerjasama dari seluruh pihak terkait baik pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat. Terdapat berbagai program yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir dalam menurunkan angka kemiskinan diantaranya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar, Dana Desa, Program Keluarga Harapan dan lain sebagainya (Ratri & Sholeh, 2019).

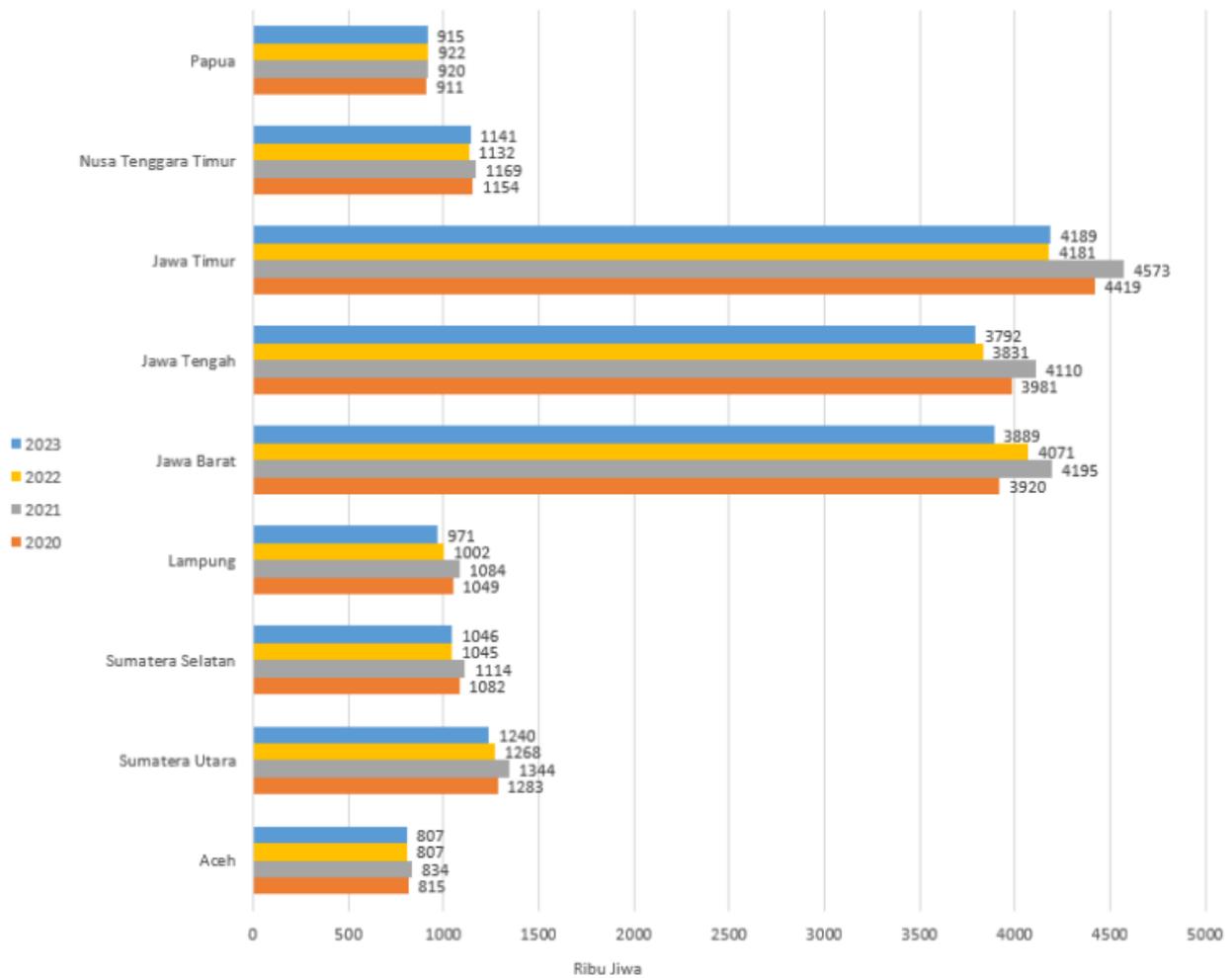
**Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 2015-2023**



**Sumber:** Badan Pusat Statistik (Diolah)

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa, pemerintah Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin dalam beberapa tahun terakhir meskipun pada tahun 2020 terjadi peningkatan cukup signifikan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan dalam bentuk kerja keras dan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sosial baik tunai dan non-tunai (Kementerian Keuangan, 2023).

**Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi**



**Sumber:** Badan Pusat Statistik (Diolah)

Berdasarkan gambar 3 di atas, terdapat sembilan Provinsi dengan sebaran jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia di antaranya Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Aceh. Dalam hal ini, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 41.416.407 jiwa dan memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 4.189 juta jiwa pada tahun 2023 yang menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023).

Tingginya jumlah penduduk miskin di Jawa Timur dapat berdampak pada masalah yang serius. Penduduk yang berada dalam kemiskinan sebagian besar mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi karena produktivitas dan potensi dari sumber daya manusia yang ada tidak

dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, tingginya jumlah penduduk miskin dapat menciptakan lingkaran kemiskinan dalam suatu keluarga dan jika dibiarkan terus menerus akan sangat sulit untuk diputuskan dari generasi ke generasi lain. Oleh karena itu, masalah kemiskinan bukan hanya masalah yang bersifat jangka pendek namun akan berdampak pada jangka panjang terhadap masalah pembangunan ekonomi karena sumber daya manusia sebagai penggerak utama perekonomian suatu wilayah tidak bekerja secara optimal. Sehingga, faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Jawa Timur menjadi penting untuk dianalisis.

Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memberikan akses bagi individu terhadap keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman guna meningkatkan kemampuannya yang dibutuhkan untuk bersaing dalam dunia pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pada gilirannya dapat mendapatkan upah yang lebih tinggi (Azizah & Kusuma, 2018).

Selain pendidikan, kesehatan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tingkat kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk tetap produktif dalam pekerjaan mereka. Ketika individu memiliki kesehatan yang baik, maka semakin besar kemampuan dalam bekerja secara efektif dan efisien yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi. Dengan fokus pada kesehatan masyarakat, masyarakat dapat mencegah dan mengurangi penyakit yang bersifat menular karena dapat menghambat produktivitas (Tungkele et al., 2023).

Pendapatan dapat menjadi salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Bagi penduduk yang bekerja sebagai pekerja, kesejahteraan pekerja dapat ditingkatkan melalui upah. Upah minimum provinsi atau yang biasa disingkat UMP adalah batas upah yang diberikan kepada para pekerja dan berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi. Ketika upah minimum meningkat, maka dapat meningkatkan kesejahteraan seperti meningkatkan taraf hidup dan konsumsi dan pada gilirannya dapat mengurangi beban keuangan. Dengan demikian, hal ini dapat membantu memberikan kesempatan yang lebih merata bagi para tenaga kerja untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka melalui pendapatan (Chairunnisa & Qintharah, 2022).

Masalah kemiskinan juga dapat dianalisis melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita suatu daerah. PDRB per kapita yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. Dalam hal ini, menunjukkan aktifnya

kegiatan-kegiatan ekonomi dan pada gilirannya dapat membantu individu yang berada dalam kemiskinan untuk ikut serta dalam menggerakkan perekonomian di wilayahnya melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan dan mobilitas sosial. Dengan demikian, semakin tinggi PDRB per kapita, maka semakin besar sumber penerimaan di suatu daerah (Takasamping et al., 2023).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang, permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur perlu adanya perhatian khusus bagi pemerintah untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin agar sumber daya manusia yang tersedia menjadi berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Di samping itu, kemiskinan sangat erat kaitannya dengan pengangguran. Tingginya angka pengangguran akan menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan karena tidak memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, jika melihat data Badan Pusat Statistik tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Timur angkanya cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lain bahkan dengan provinsi di Pulau Jawa yaitu sebesar 4.88% pada tahun 2023. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (Badan Pusat Statistik, 2023).

Pada faktanya, tingkat pengangguran memang memberikan kontribusi terhadap jumlah kemiskinan namun masalah kemiskinan yang terjadi di Jawa Timur tidak sepenuhnya disebabkan oleh tingkat pengangguran melainkan berasal dari penduduk yang memiliki pekerjaan atau tenaga kerja. Dalam hal ini, sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur sebenarnya memiliki potensi cukup besar untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi sebagai penggerak utama dari aktivitas ekonomi, namun terdapat faktor lain yang menjadi penghambat yaitu perbedaan pendapatan, tidak meratanya pembangunan dan kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. Di mana penduduk dengan berpenghasilan rendah sebagian besar tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dasarnya dan menjadi penyebab terjadinya masalah kemiskinan.

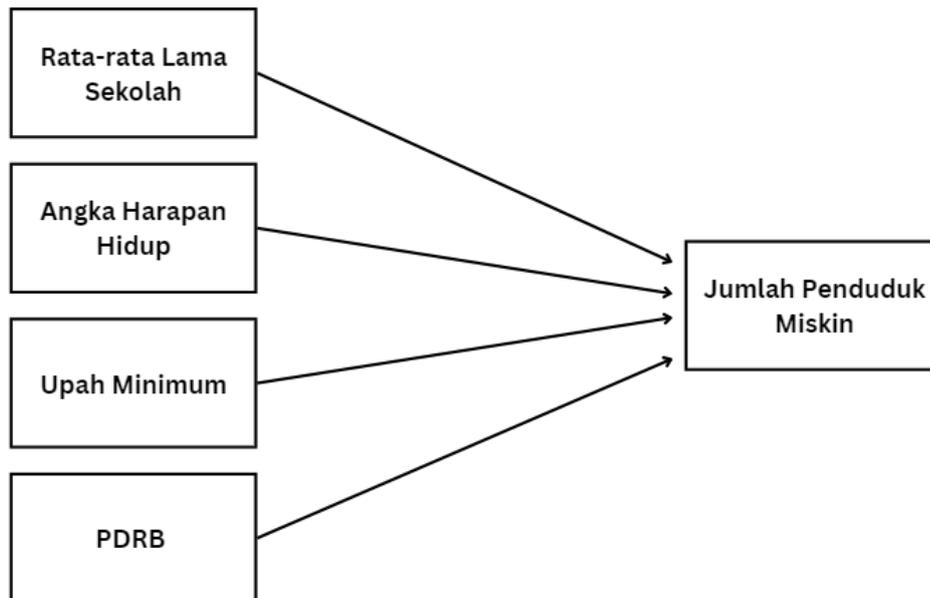
## **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan, kesehatan, upah minimum, dan PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2023. Dengan tercapainya penelitian yang dilakukan, penulis berharap dapat

memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta dapat membantu pemangku kebijakan dalam menentukan kebijakan yang tepat dan efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan berdasarkan hasil penelitian.

## 1.4 Kerangka Pemikiran

**Gambar 4. Kerangka Pemikiran**



Tingkat pendidikan yang digambarkan oleh rata-rata lama sekolah merupakan salah satu bentuk dari modal manusia yang mampu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki peran penting dalam mengatasi masalah kemiskinan. Ketika lebih banyak orang memiliki akses terhadap pendidikan yang tinggi, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan layak dengan upah yang lebih tinggi karena pendidikan memberikan individu keterampilan, pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan dengan lebih baik sehingga membantu kemudahan untuk bersaing dalam dunia pekerjaan. Dengan demikian, kebutuhan hidup dasar akan terpenuhi maka dari itu tingkat pendidikan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

Tingkat kesehatan yang digambarkan oleh angka harapan hidup juga memiliki peran penting dalam mengatasi masalah kemiskinan. Angka harapan hidup yang tinggi mencerminkan kesehatan yang baik dan memiliki kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Individu dengan kondisi kesehatan yang baik memungkinkan individu menjadi lebih produktif sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan efektif. Ketika produktivitas meningkat,

penghasilan akan ikut meningkat melalui insentif, promosi dan penghargaan yang pada gilirannya berdampak positif pada kenaikan pendapatan sehingga seluruh kebutuhan dasar akan terpenuhi. Dengan demikian, angka harapan hidup dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur (Efendi et al., 2019).

Upah minimum berperan penting dalam menentukan tingkat penghasilan terendah yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja kepada para pekerja/buruh. Penetapan upah minimum yang tepat dengan memperhatikan kondisi ekonomi seperti inflasi, dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari melalui peningkatan pendapatan. Dengan demikian, peningkatan upah minimum dapat membantu mereka keluar dari garis kemiskinan atau setidaknya mengurangi tekanan keuangan yang mereka hadapi dan pada gilirannya dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencerminkan kemajuan ekonomi di suatu wilayah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Ketika PDRB per kapita meningkat, maka pendapatan individu dalam wilayah tersebut meningkat dikarenakan terjadi peningkatan ekonomi disuatu wilayah yang memungkinkan membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi penduduknya dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk di wilayah tersebut. Dengan demikian, peningkatan pendapatan mampu membantu individu dan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan lebih baik (Pratiwi & Sa'roni, 2023). Lebih lagi, peningkatan PDRB per kapita sering kali diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan tetapi membuka akses terhadap wilayah untuk memberikan kesempatan ekonomi yang lebih luas.